

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negar*. Jakarta. Glora Madani Press
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Djafar, Muhammad Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- Efendi, Lutfi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang. Bayumedia
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- M Hadjon, Philipus. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya. Universitas Airlangga.
- Manullang, M. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Marbun, SF. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta. FH UII Press,
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi Pemerintahan Daerah*. Malang. Bayu Media.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- P Siagian, Sondang. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung,
- Rasyid, Abdul Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta. Laks Bang Pressindo.
- Shadily, Hassan. 1989. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta. PT.Bina Aksara.

- Situmorang, Victor. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Supriatna, Tyahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

### **Sumber Penunjang**

- <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp> , diakses pada tanggal 1 November 2015
- <http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 1 November 2015
- <http://ahmadfaisal2.blogspot.co.id.html>, diakses pada tanggal 1 November 2015
- <http://www.bpkp.go.id/Profil-BPKP-Lampung-Stakeholder-Mitra-Kerja>, diakses pada tanggal 5 Desember 2015